



RENCANA KERJA(RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Jenderal Sudirman No.02 RT.04 Tenggarong 75512**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 mengacu kepada Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan,tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meng amanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang di laksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun untuk jangka waktu 1tahun. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026.

Lebih lanjut isi dari RENJA ini adalah gambaran perencanaan berbagai rencana pembangunan yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai program dan kegiatan serta memperhatikan berbagai kondisi dan potensi lokal yang akan menjadi bagian dalam proses pembangunan di masa-masa yang akan datang dimana untuk program,kegiatan serta sub kegiatan telah dilakukan penyesuaian dengan PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kode fikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikian RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun untuk dapat dipedomani bagi seluruh jajaran pejabat beserta staf di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan pembangunan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tenggarong, April 2024





Ditandatangani secara elektronik oleh :

Pt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ARIANTO, S.Sos.,M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)



Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra_PD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program dan Kegiatan	54
BAB VPENUTUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara substansial menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati dan program DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026.

RENJA DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kinerja DPPKB untuk tahun keempat periode RENSTRA DPPKB 2021-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPPKB Tahun 2023 untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja RENSTRA dan RPJMD yang di selaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional.

Penyusunan RENJA DPPKB Tahun 2025 mengacu ada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. RENJA DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RENJA.
2. Penyusunan Rancangan Awal RENJA DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada RENSTRA DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara, evaluasi hasil RENJA tahun lalu dan evaluasi hasil RENJA tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan RENJA berdasarkan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : P-15/SETDAKAB KUKAR/000.7.2/01/2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024
4. Pembahasan Rancangan RENJA DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Forum OPD DPPKB untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kutai Kartanegara tahun 2024 memperhatikan kepada peraturan Perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan RENJA dan arah garis kebijakan terkait yang dirumuskan antara lain:

- 1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata CaraJangka Panjang Daerah dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 11) raturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sertatata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 12) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja PemerintahDaerah;
- 13) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wujud Pertanggung jawaban dalam mencapai visi misi Pemerintah Daerah.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 tahun.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang**
- 1.2. Landasan Hukum**
- 1.3. Maksud dan Tujuan**
- 1.4. Sistematika Penulisan**

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD Tahun lalu dan Capaian Renstra-PD**
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan**

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA-PD**

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan**

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA-PD

Pencapaian keberhasilan kinerja program/kegiatan pada tahun **2023** secara keseluruhan capaian fisik rata-rata **95,4%** dan realisasi keuanganrata-rata **80,8%**.

Penjelasan Analisis Kinerja

Adapun analisis pencapaian kinerja output (fisik) sebagai berikut:

- 1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** Realisasi Anggaran Fisik sebesar **99,7%**.
- 2. **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** Realisasi Anggaran Fisik sebesar **90,6 %**.
- 3. **Program Pengendalian Penduduk** Realisasi Anggaran Fisik sebesar **90,9 %**
- 4. **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** Realisasi Anggaran Fisik sebesar **96,3%**.

Untuk rekapitulasi capaian sebagaimana dalam Tabel T-29.

Penjelasan Analisis Keuangan

Pencapaian keberhasilan kinerja keuangan program/kegiatan pada tahun **2023** secara keseluruhan target keuangan untuk Belanja Langsung yang **dikelola** sebesar **Rp.32 .030.197.289,00** di **realisasikan** sebesar **Rp.25.866.685.185,00**

Adapun analisis pencapaian realisasi keuangan sebagai berikut:

- 1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan target anggaran sebesar **Rp.17.635.624.219,00** terealisasi sebesar **Rp 15.189.209.897,00** atau tercapai sekitar **86,1 %**.
- 2. **Program Pengendalian Penduduk** dengan target **anggaran sebesar Rp. 1.484.609.420,00** terealisasi **sebesar Rp. 1.074.028.066,00** atau sekitar **72,3%**.
- 3. **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** dengan target **anggaran sebesar Rp.6.570.152.000,00** terealisasi **sebesar Rp.3.897.848.589,00** atausekitar **59,3%**.
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** dengan target anggaran sebesar **Rp.6.339.788.650,00** terealisasi sebesar **Rp.5.705.598.633,00** atau sekitar **90,2 %**.

Tabel T-C.29													
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA DPPKB dan Pencapaian RENSTRA DPPKB s/d Tahun 2025													
Kabupaten Kutai Kartanegara													
Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
								Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
				Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,10	85,10	85,10	85,10	100,00	85,10	255,30	3,00
	1,1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen rencana anggaran dan evaluasi kinerja perangkat darah	885,00	177,00	177,00	177,00	100,00	177,00	531,00	0,60
	1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	15,00	3,00
	1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA	200,00	40,00	57,00	40,00	70,18	57,00	137,00	0,69
	1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-P	100,00	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	60,00	0,60
	1.1.4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA	200,00	-	40	40	100,00	40	80,00	0,40
	1.1.5		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-P	100,00	20,00	20	20	100,00	20	60,00	0,60
	1.1.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	0,60
	1.1.7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	200,00	40,00	57,00	40,00	70,18	40,00	120,00	0,60
												-	
	1,2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuanagan perangkat daerah yang akuntabel	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	0,60
	1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	70,00	14,00	14,00	14,00	100,00	14,00	42,00	0,60
	1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP		Jumlah waktu penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	0,60
	1.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan Akhir Tahun	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
	1.2.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	200,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	0,18
	1.2.5		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5,00	2,00	2,00	2,00	100,00	1,00	5,00	1,00

	1,3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
	1.3.1		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah LAporan Barang Milik Daerah yang di Rekonsiliasi	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
	1.3.2		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di lakukan Penatausahaan	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
											-	
	1,4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	340,00	68,00	68,00	68,00	100,00	1,00	137,00	0,40
	1.4.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	-	-	-	-			-	
	1.4.2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis	70,00	20,00	-	-			20,00	0,29
											-	
	1,5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	100,00	100,00	42	100,00	238,10	42	242,00	2,42
	1.5.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	150,00	30,00	30	30,00	100,00	30	90,00	0,60
	1.5.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Yang di sediakan	10,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	0,60
											-	
	1.5.3		Penyediaan Barang Cetakn dan Penggndaan	Jumlah Barang Cetakn dan Penggndaan	134.310,00	225,00	26.862	26.862,00	100,00	26.862	53.949,00	0,4017
											-	
	1.5.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan Koran	2.200,00	960,00	960	440,00	45,83	960	2.360,00	1,07
	1.5.5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	750,00	150,00	170	150,00	88,24	150	450,00	0,60
	1.5.6		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang ditata	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
											-	
	1,6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah	135,00	23,00	23,00	23,00	100,00	23,00	69,00	0,51
	1.6.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	59,00	7,00	7	7,00	100,00	7	21,00	0,36
	1.6.2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Pagar Balai Penyuluhan KB	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	1,00
	1.6.3		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan sarana Prasarana gedung Kantor	75,00	30,00	30	30,00	100,00	30	90,00	1,20
											-	
	1,7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang di Sediakan	60,00	12,00	12	12,00	100,00	12	36,00	0,60
	1.7.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	60,00	12,00	12	12,00	100,00	12	36,00	0,60
	1.7.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,00	12,00	12	12,00	100,00	12	36,00	0,60
	1.7.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenga Pendukung Non PNS	60,00	12,00	12	12,00	100,00	12	36,00	0,60

[illegible]

	3,1		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE	25,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	15,00	0,60
	3.1.1		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah pelaksanaan hari besar dan pameran	25,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	15,00	0,60
	3.1.2		Komunikasi,informasi dan edukasi (KIE)program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah sarana KIE	25,00	2,00	2,00	2,00	200,00	2,00	6,00	0,24
	3.1.3		Penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK	Jumlah sarana KIE	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
	3.1.4		Promosi dan KIE proram KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik dan media luar ruang	Jumlah kegiatan Promosi	20,00				-		-	-
	3.1.5		Penggunaan media masa cetak,elektronik,dan media lain nya sesuai keaifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK	Jumlah Media	13,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,23
	3.1.6		Pelaksanaan Mekanisme oprasional Program KKBPK melalui rapat koordinas (Rakorcam) rapat koordinasi desa (Rakordes),dan minilokakarya	Jumlah Peserta	540,00	108,00	108,00	108,00	100,00	108,00	324,00	0,60
	3.1.7		Pengelolaan operasional dan sarana dibalai penyuluhan KKBPK	Jumlah kegiatan di balai penyuluhan KB	90,00	18,00	18,00	18,00	100,00	18,00	54,00	0,60
	3,2		Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksana nya kegiatan oprasional KB dilapangan	1185		237	237	100,00	237	474,00	0,40
											-	
	3.2.1		Pembinaan IMP dan program KKBPK dilini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah IMP yang di bina	1185	237	237	237	100,00	237	711,00	0,60
	3.2.2		Penyediaan sarana pendukung opeasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung	281	5	5	5	100,00	5	15,00	0,05
	3.2.3		Penguatan pelaksanaan penyuluhan,pergerakan,pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga beencana /prnyuluh lapangan keluarga berencana PKB/PLKB	Jumlah PKB/PLKB	345	69	69	69	100,00	69	207,00	0,60
	3.2.4		Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD/Sub PPKBD	1185	237	237	237	100,00	237	711,00	0,60
	3,3		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya alat, obat dan kontasepsi pada Fasilitas Kesehatan	200,00	40,00	40,00	40,00	100,00	40,00	120,00	0,60
	3.3.1		Pengendalian Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Faskes	200,00	40,00	40,00	40,00	100,00	40,00	120,00	0,60
	3.3.2		Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontarepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Apseptor MKJP	3.500,00	700,00	700,00	700,00	100,00	700,00	2.100,00	0,60
	3.3.3		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB	15,00	5,00	5	3,00	60,00	3,00	11,00	0,73
	3.3.4		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Apseptor yang dilayani	1.920,00	1.600,00	1600	320,00	20,00	320,00	2.240,00	1,17
											-	
	3,4		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan ORMAS / POKJA yang terlibat dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	80,00	60,00	60,00	60,00	100,00	60,00	180,00	2,25
	3.4.1		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Ormas dan Mitra Kerja	190,00	38,00	38	38,00	100,00	38,00	114,00	0,60
	3.4.2		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase Kampung KB Bernilai Baik	100,00	20,00	20	20,00	100,00	20,00	60,00	0,60
	3.4.3		Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB bernilai Baik	100,00	20,00	20	20,00	100,00	20,00	60,00	0,60
											-	
	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								-	
				Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	7348	65,31	65,31	65,31	100,00	65,31	195,93	0,03

					Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	9197	72,97	72,97	72,97	100,00	72,97	218,91	0,02
					Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	64,63	57,32	57,32	57,32	100,00	57,32	171,96	2,66
					Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	9,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	0,67
					Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	100,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	150,00	1,50
					Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	73,18	56,09	56,9	56,00	98,42	56,00	168,09	2,30
												-	
	4,1		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Cakupan pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	40,15	30,72	30,72	30,72	100,00	30,72	92,16	2,30
												-	
	4.1.1		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah penyediaan sarana kelompok	164,00	54,00	54,00	54,00	100,00	54,00	162,00	0,99
												-	
	4.1.2		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah kader yang dilatih	695,00	215,00	215,00	75,00	34,88	75,00	365,00	0,53
	4.1.3		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Kelompok	1.470,00	50,00	50,00	132,00	264,00	132,00	314,00	0,21
	4.1.4		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Peserta kegiatan promosi dan sosialisasi	750,00	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	450,00	0,60
	4.1.5		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Jumlah lomba-lomba	9,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,33
	4.1.6		Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK		Dokumen	3,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	1,00
												-	
	4,2		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Cakupan peran ORMAS dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	90,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	150,00	1,67
	4.2.1		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah kerjasama dengan mitra dan ormas	48,00	18,00	18,00	18,00	100,00	18,00	54,00	1,13
	4.2.2		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah peserta	516,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	360,00	0,70
	4.2.3		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		Jumlah peserta	241,00	28,00	28,00	28,00	100,00	28,00	84,00	0,35

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kondisi umum, pencapaian kinerja pelayanan DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPPKB sebagai organisasi perangkat daerah urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada table berikut:

[illegible]

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan. Pembangunan Kependudukan dan KB di Indonesia khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara harus benar - benar dapat memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa isu strategis terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik secara regional dan nasional khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- 1) Upaya dalam mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan sesuai dengan hak reproduksi.
- 2) Perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan di pengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
- 3) Upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas menghasilkan keluarga yang berketahanan.

Beberapa Permasalahan yang di hadapi oleh DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya pencapaian tujuan “ mewujudkan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing” yaitu:

- 1) Mempertahankan Angka Total Fertility Rate (TFR) sekitar 2,13 pada tahun 2023, dan ada beberapa faktor yang membuat TFR tinggi antara lain :
 - a. Akses pelayanan Keluarga Berencana yang terbatas.
 - b. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB serta Kader KB yang belum maksimal.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana media KIE.
 - d. Kurangnya tenaga penyuluh PLKB dan PKB

- 2) Belum optimal nya Basis data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) antar stakeholder yang disebabkan oleh belum optimalnya pendataan serta koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholder.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan 8 (Delapan) fungsi keluarga yang disebabkan oleh belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan kelompok ketahanan keluarga

Untuk menanggulangi permasalahan dan isu-isu diatas maka Dinas Pengendalian Penduuduk dan Keluarga Berencana menetapkan strategi dan kebijakan. Adapun strategi yang akan

dilakukan adalah:

- 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja DPPKB
- 2) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi kebijakan antar stakeholder dalam program KKBPK
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana
- 4) Meningkatkan pembinaan kelompok ketahanan keluarga

Selanjut nya beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan oleh DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

- 1) Peningkatan Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pada DPPKB
- 2) Peningkatan kualitas basis data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
- 3) Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas.
- 4) Penguatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi KKBPK.
- 5) Peningkatan jumlah kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R,PPKS,UPPKS/UPPKA)
- 6) Pengembangan dan pemberdayaan kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R,PPKS,UPPKS/UPPKA).
- 7) Penyediaan sarana dan prasarana serta operasional kelompok ketahanan keluarga (BKB.BKR.BKL,PIK-,PPKS,UPPKS/UPPKA).
- 8) Peningkatan promosi dan sosialisasi program KKBPK.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti RPJM Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMD dan RKP Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana menyebutkan bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan. Memperhatikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan kondisi tahun 2025 serta prospek tahun 2025 maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 di tetapkan sebagai berikut :

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Program dan Kegiatan yang dimasukkan dalam rancangan awal RKPD merupakan program usulan hasil penyesuaian PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 dan KEPMEN DAGRIIN Nomor 050-3708 Tahun 2020. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat di lihat pada table di berikut ini.

1,2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Tenggarong	14,00	8.507.390.798,00	APBD		14,00	8.507.390.798,00
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Tenggarong	12,00	8.217.390.798,00	APBD		12,00	8.217.390.798,00
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tenggarong	1,00	15.000.000,00	APBD		1,00	15.000.000,00
1.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	40,00	15.000.000,00	APBD		40,00	15.000.000,00
1.2.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulnan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	1,00	250.000.000,00	APBD		1,00	250.000.000,00
1.2.5		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	1,00	10.000.000,00	APBD		1,00	10.000.000,00
1,3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Tenggarong	1,00	105.000.000,00	APBD		1,00	105.000.000,00
1.3.1		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang direkonsiliasi	Tenggarong	68,00	75.000.000,00	APBD		68,00	75.000.000,00
1.3.2		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dilakukan penatausahaan	Tenggarong	-	30.000.000,00	APBD		-	30.000.000,00
1,4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Tenggarong	42,00	50.000.000,00	APBD		42,00	410.048.000,00
1.4.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	30,00		APBD		30,00	360.048.000,00
1.4.2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	2,00		APBD		2,00	
1.4.2		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Tenggarong		50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
1,5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong	#####	464.629.800,00	APBD		26.862,00	449.629.800,00

1.5.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tenggarong	440,00	100.000.000,00	APBD		440,00	75.000.000,00
1.5.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang disediakan	Tenggarong	150,00	60.000.000,00	APBD		150,00	70.000.000,00
1.5.3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Tenggarong	1,00	19.999.800,00	APBD		1,00	19.999.800,00
1.5.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Tenggarong	30,00	9.630.000,00	APBD		30,00	9.630.000,00
1.5.5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tenggarong	15,00	200.000.000,00	APBD		15,00	200.000.000,00
1.5.6		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip	Tenggarong	-	75.000.000,00	APBD		-	75.000.000,00
1,6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Tenggarong	12,00	150.000.000,00	APBD		12,00	100.000.000,00
1.6.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan gedung kantor	Tenggarong	12,00	75.000.000,00	APBD		12,00	50.000.000,00
1.6.2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Pagar Balai Penyuluhan KB	Tenggarong	12,00	-	APBD		12,00	
1.6.3		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan sarana prasarana gedung kantor	Tenggarong	12,00	75.000.000,00	APBD		12,00	50.000.000,00
1,7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Tenggarong	11,00	2.141.032.308,00	APBD		11,00	2.191.032.308,00
1.7.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	160,00	200.000.000,00	APBD		160,00	200.000.000,00
1.7.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	1,00	150.000.000,00	APBD		1,00	200.000.000,00
1.7.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	Tenggarong		1.791.032.308,00	APBD			1.791.032.308,00

1,8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tenggarong	1,00	207.901.578,00	APBD		1,00	195.853.578,00	
1.8.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	Tenggarong	1,00	60.000.000,00	APBD		1,00	70.000.000,00	
1.8.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	Tenggarong	1,00	97.901.578,00	APBD		1,00	75.853.578,00	
1.8.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya uang dipelihara / direhabilitasi	Tenggarong	6,00	50.000.000,00	APBD		6,00	50.000.000,00	
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK		-	80,00	650.000.000,00		-	80,00	550.000.000,00
			Tersedianya dokumen grand design kependudukan		80,00				80,00		
2,1		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dalam pengendalian kuantitas penduduk	Kutai Kartanegara	1,00	225.000.000,00	APBD		1,00	125.000.000,00	
2.1.1		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen grand design	Kutai Kartanegara	100,00	-	APBD		100,00		
2.1.2		Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	Kutai Kartanegara	#####	75.000.000,00	APBD		10.000,00	50.000.000,00	
2.1.3		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Tersedianya Materi Pendidikan dan Kependudukan	Kutai Kartanegara	43,00	75.000.000,00	APBD		43,00		
2.1.4		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Peserta Rapat	Kutai Kartanegara		75.000.000,00	APBD			75.000.000,00	
				Kutai Kartanegara			APBD				
2,2		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	Kutai Kartanegara	5,00	425.000.000,00	APBD		5,00	425.000.000,00	
2.2.1		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Database	Kutai Kartanegara	5,00	150.000.000,00	APBD		5,00	150.000.000,00	
2.2.2		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Buku Profil	Kutai Kartanegara	2,00	100.000.000,00	APBD		2,00	100.000.000,00	
2.2.3		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	KK Yang Terdata	Kutai Kartanegara	1,00	175.000.000,00	APBD		1,00	175.000.000,00	
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Angka Pemakaian CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun		3,00	1.060.000.000,00			3,00	1.057.000.000,00	
			Angka peserta KB Baru		108,00				108,00		

				Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		18,00				18,00	
				Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		237,00				237,00	
				Persentase Angka Drop Out Akseptor		237,00				237,00	
3,1			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE	Kutai Kartanegara	69,00	535.000.000,00	APBD		69,00	485.000.000,00
3.1.1			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Perayaan hari besar dan pameran	Kutai Kartanegara	237,00	260.000.000,00	APBD		237,00	260.000.000,00
3.1.2			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Jenis Kegiatan KIE	Kutai Kartanegara	40,00	75.000.000,00	APBD		40,00	75.000.000,00
3.1.3			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta media luar ruang	Jumlah Kegiatan Promosi	Kutai Kartanegara			APBD			75.000.000,00
3.1.4			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya LokalPromosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi Melalui Media	Kutai Kartanegara	40,00	100.000.000,00	APBD		40,00	
3.1.5			Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Media Yang Digunakan	Kutai Kartanegara	700,00	100.000.000,00	APBD		700,00	75.000.000,00
3,2			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya kegiatan operasional KB di Lapangan	Kutai Kartanegara	400,00	100.000.000,00	APBD		400,00	172.000.000,00
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah IMP yang dibina	Kutai Kartanegara	237,00		APBD		237,00	72.000.000,00
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana pendukung	Kutai Kartanegara	69,00		APBD		69,00	
3.2.1			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB	Kutai Kartanegara	70,00	100.000.000,00	APBD		70,00	100.000.000,00

4.1.1			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah penyediaan sarana kelompok	Kutai Kartanegara		200.000.000,00	APBD			150.000.000,00
				ATTG							
				Pemancar FM Mini							
				BKB Kit Stunting							
				Kit Siap Nikah Anti Stunting							
4.1.2			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang dalam kelompok	Kutai Kartanegara		200.000.000,00	APBD			150.000.000,00
4.1.3			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok	Kutai Kartanegara		300.000.000,00	APBD			300.000.000,00
4.1.4			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta kegiatan promosi dan sosialisasi	Kutai Kartanegara		75.000.000,00	APBD			50.000.000,00
4.1.5			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah lomba-lomba	Kutai Kartanegara		75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
4.1.6			Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Dokumen Kebijakan	Kutai Kartanegara		-	APBD			50.000.000,00
					Kutai Kartanegara			APBD			
4,2			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan peran ORMAS dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kutai Kartanegara		540.000.000,00	APBD			350.000.000,00
4.2.1			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kerjasama dengan mitra dan ORMAS	Kutai Kartanegara		150.000.000,00	APBD			100.000.000,00
4.2.2			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta	Kutai Kartanegara		215.000.000,00	APBD			150.000.000,00

[illegible]

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan RENJA 2025 ini ada usulan masyarakat khusus penentuan perumusan program dan kegiatan Kelompok Kerja berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, Musrenbang SKPD tingkat Provinsi dan Musrenbang kabupaten/kota serta mengakomodir usulan dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Beberapa isu strategis peningkatan kesejahteraan keluarga sebagaimana yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026, yang harus mendapat perhatian khusus adalah Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera atau program KKBPK, maka di perlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang harus bermuara pada Isu Srategis Kutai Kartanegara yaitu Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan dengan sasaran meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan hingga tingkat desa dan terciptanya budaya

USULAN 2025				
NO	KAMUS USULAN	KECAMATAN	JUMLAH	DIPROSES
1	Penyediaan Alat Penunjang /peraga (BKB KIT,BKB HI,,BKL KIT STUNTING,BKR KIT,KIT Siap Nikah Anti Stunting	Sebemban,Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Diproses
2	Pelatihan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Desa Muara Enggelam,Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Diproses
3	Penyediaan Alat Penunjang /peraga (BKB KIT,BKB HI,,BKL KIT STUNTING,BKR KIT,KIT Siap Nikah Anti Stunting	Teluk Pemedas,Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Diproses
4	Pelatihan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Teluk Pemedas,Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Diproses

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu di selenggarakan pembangunan yang berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakan nya Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan psesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Sebagai mana diketahui bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 68 tahun 2016 Tentang kedudukan Sususan Organisasi Fungsi serta Tata Kerja perangkat Daerah sebagai instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dituntut mempunyai Rencana Kerja (RENJA).

Rencana Kerja (RENJA di susun berdasarkan program yang terencana, terarah serta terukur yang di harapkan dapat memenuhi kehendak aspirasi serta partisipasi masyarakat sejalan
Dengan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tahun 2024 merupakan tahun ke- 4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021 s/d 2026 disusun berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka ada rencana aksi untuk mereview Dokumen RENSTRA Dinas sehingga akan terjadi Perubahan terhadap indikator sasaran RENSTRA. Hal ini penting mengingat RENSTRA merupakan acuan implementatif bagi seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijakan, program dan kegiatan RENSTRA SKPD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

3.2 .Tujuan dan Sasaran RENJA-PD

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Beberapa isu penting pembangunan terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik ditingkat Nasional, Regional maupun ditingkat daerah di antaranya

Adalah sebagai berikut :

1. Upaya dalam mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur ke hamilan sesuai dengan hak reproduksi.
2. Perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan di pengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
3. Upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas menghasilkan keluarga yang berketahanan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menghadapi berbagai isu penting tersebut telah menyusun tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan sebagai berikut:

VISI (RPJMD)	:	"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"		
MISI (RPJMD)*	:	Meningkatkan Pembangunan Daya Manusia Yang Berakhlak Unggul dan Berbudaya		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pembangunan Keluarga melalui pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana		Meningkatnya peran stakeholder dalam program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi kebijakan antar stakeholder dalam program KKBPK	Peningkatan kualitas basis data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
		Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana	Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas
				Penguatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi KKBPK
				Peningkatan kuantitas dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB
		Meningkatnya Pemberdayaan Keluarga	Meningkatkan pembinaan kelompok ketahanan keluarga	Peningkatan jumlah kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS, UPPKS/UPPKA)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Pencapai Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang di berikan kewenangan melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar, berusaha memberikan pelayanan dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan Visi,Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang di sebabkan ada nya faktor penghambat.Namun demikian terdapat factor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan. Permasalahan, faktor penghambat dan faktor pendorong dapat dilihat pada table berikut:

PERMASALAHANPOKOK (eselon II)	PERMASALAHAN (eselon III)	AKARMASALAH (eselon IV)
Rendahnya Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Kutai Kartanegara	Kurangnya peran stakeholder dalam Program KKBPK	Belum optimalnya basis Data Kependudukan, KeluargaBerencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) antar stakeholder
	Masih tingginya angkaTotal Fertility Rate (TFR) diKabupaten Kutai Kartanegara	Akses pelayanan yang kurang
		Kuantitas dan kualitas Tenaga penyuluh KB dan Petugas lapangan KB serta Kader KB yang belum maksimal
		Kurangnya Sarana Prasarana Media KIE
	Kurangnya pemberdayaan keluarga	Belum optimalnya Pembinaan dan Pemberdayaan kelompok Ketahanan keluarga
		Belum terpenuhinya sarana Dan prasarana serta Operasional kelompok Ketahanan keluarga

b. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi terutama dengan adanya PERMENDAGRIN omor 90 Tahun 2019 dan KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020, maka Program pada Dinas PPKB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 sebanyak **1 Program Generik dan 3 Program Teknis**. Dengan perincian dapat dilihat dari **Tabel** Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Berdasarkan Sumber Pendanaan tahun 2025.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyesuaikan jenis, target dan sasaran program maupun kegiatan, Lokasi kegiatan bisa bersifat menyeluruh di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Kegiatan yang bersifat pendampingan dan juga yang terfokus ke satu Kecamatan atau Desa jika jenis kegiatannya bersifat Pelatihan Keterampilan.
3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif di tahun 2025 adalah sebesar Rp. 15.200.954.484, -

KERTAS KERJA RENJA TAHUN 2025															
PERANGKAT DAERAH		: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
URUSAN		: PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
Sebelum Berubah						Sesudah Berubah								Selisih Antara Pagu RKPD 2025 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF		
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)							PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan					Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
	Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Pembangunan Keluarga melalui Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas dan melayani	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Uraian indikator kinerja Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK Menurunnya Angka TFR per WUS (15-49 Tahun) Indek Pembangunan Keluarga Nilai SAKIP Perangkat Daerah	✓ 40 ✓ 2,16 ✓ 60 ✓ 85,40	Persen Persen Persen Persen	15.200.954.484		Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Pembangunan Keluarga melalui Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas dan melayani	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Uraian indikator kinerja Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK Menurunnya Angka TFR per WUS (15-49 Tahun) Indek Pembangunan Keluarga Nilai SAKIP Perangkat Daerah	✓ 40 ✓ 2,16 ✓ 60 ✓ 85,40	Persen Persen Persen Persen	27.993.309.356	12.792.354.872	
Kode Rekening	Nama Program		Uraian indikator kinerja			12.025.954.484	Kode Rekening	Nama Program		Uraian indikator kinerja			20.112.378.206		
2.14. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.40	Persen		2.14. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.40	Persen			
2. 14.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Rencana,Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah	177	Dokumen	475.000.000	2. 14.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Rencana,Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah	177	Dokumen	475.000.000		
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	175.000.000	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	175.000.000		
2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	40	Dokumen	50.000.000	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	40	Dokumen	50.000.000		
2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20	Dokumen	20.000.000	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20	Dokumen	20.000.000		

2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	30.000.000	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	30.000.000		
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40	Laporan	200.000.000	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	200.000.000		
2. 14 .01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Laporan	8.507.390.798	2. 14 .01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Laporan	8.507.390.798		
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjagn ASN	55	Orang/bulan	8.217.390.798	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjagn ASN	55	Orang/ bulan	8.217.390.798		
2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	15.000.000	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	15.000.000		
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	15.000.000	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	15.000.000		
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40	Laporan	250.000.000	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	250.000.000		
2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	10.000.000	2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	10.000.000		
2. 14 .01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	105.000.000	2. 14 .01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	355.000.000		
2. 14 .01. 2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	75.000.000	2. 14 .01. 2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	275.000.000	200.000.000	
2. 14 .01. 2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	30.000.000	2. 14 .01. 2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	80.000.000	50.000.000	
2. 14 .01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah ASN	56	Orang	50.000.000	2. 14 .01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah ASN	56	Orang	-		
2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	Orang	50.000.000,00							- 50.000.000,00	Anggaran dipindah dan digeser ke kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

2.14.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						2.14.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	35	Orang	250.000.000	250.000.000,00	Usulan Sub Kegiatan Baru Sesuai Surat Edaran Bupati, 20 Jam Pelatihan bagi Pegawai dalam 1 Tahun pada Dinas KB
							2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	225.000.000		
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	42	Layanan	464.629.800	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	42	Layanan	869.999.800		
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	Paket	100.000.000	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	225.000.000	125.000.000	
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	2	Paket	60.000.000	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	3	Paket	150.000.000	90.000.000	
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	26.862	Paket	19.999.800	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	19.999.800		
2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	440	Dokumen	9.630.000							9.630.000		
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	200.000.000	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	300.000.000	100.000.000	
2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	75.000.000	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	175.000.000	100.000.000	
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah	30	Unit	150.000.000	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah	30	Unit	8.822.086.030		
2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	15	Unit	75.000.000	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan		Unit	175.000.000	100.000.000	
2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	8.572.086.030	8.572.086.030	Usulan Sub Kegiatan Baru (Pembangunan Balai Penyuluhan KB (Hasil usulan Musrenbang Kecamatan Tabang Rp. 1.350.000.000,00 dan Kelanjutan Pembangunan Kantor DPPKB eks. Kantor BAPEMAS Jl. Jelawat Rp. 7.222.086.030,00)
2.14.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	Unit	75.000.000	2.14.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	Unit	75.000.000	-	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Lapaoran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Laporan	2.066.032.308	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Lapaoran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Laporan	875.000.000		
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	200.000.000	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	300.000.000	100.000.000	

2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	75.000.000	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	75.000.000		
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.791.032.308	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	500.000.000		
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang Dipelihara	171	Unit	207.901.578	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang Dipelihara	171	Unit	207.901.578		
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	Unit	60.000.000	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	Unit	60.000.000		Perubahan Target
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	160	Unit	97.901.578	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84	Unit	97.901.578		Perubahan Target
2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	50.000.000	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	50.000.000		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	40	Persen	725.000.000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	40	Persen	697.160.000		
			Tersedianya dokumen grand design kependudukan	1	Dokumen					Tersedianya dokumen grand design kependudukan	1	Dokumen			
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Meningkatnya Nilai Indeks Pembangunan Keluarga	60	Persen	300.000.000	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Meningkatnya Nilai Indeks Pembangunan Keluarga	60	Persen	275.000.000		
2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	35	Dokumen	75.000.000	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	6	Dokumen	50.000.000		
2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	6	Kegiatan	75.000.000	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	6		75.000.000		
2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	Dokumen	75.000.000	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1		75.000.000		

2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	80	Laporan	75.000.000	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2	Laporan	75.000.000		
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Tercapainya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	80	Persen	425.000.000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Tercapainya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	80	Persen	422.160.000		
2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1	Dokumen	150.000.000	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1	Dokumen	100.000.000		
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	10.000	Dokumen	175.000.000	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	20	Dokumen	247.160.000		
2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	100	Dokumen	100.000.000	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	Dokumen	75.000.000		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) cara modern Cakupan angka unmet need Persentase akseptor MKJP Persentase Drop Out (DO) Persentase peserta KB Baru	77.20 11.00 16.10 12.12 15.17	Persen Persen Persen Persen Persen	1.060.000.000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) cara modern Cakupan angka unmet need Persentase akseptor MKJP Persentase Drop Out (DO) Persentase peserta KB Baru	77.20 11.00 16.10 12.12 15.17	Persen Persen Persen Persen	3.333.771.150		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Kegiatan Advokasi dan KIE	5	Event	535.000.000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Kegiatan Advokasi dan KIE	5	Event	830.000.000		
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	Laporan	100.000.000	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Laporan	270.000.000		

2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5	Dokumen	100.000.000	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Dokumen	75.000.000		
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2	Dokumen	75.000.000	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan		Dokumen	225.000.000		
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh poka advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5	Organisasi	260.000.000	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh poka advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Organisasi	260.000.000		
2. 14 .03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah Kegiatan Operasional KB di Lapangan	237	Desa	100.000.000	2. 14 .03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah Kegiatan Operasional KB di Lapangan	237	Desa	965.773.400		
2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	69	Unit	100.000.000	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	55	Unit	100.000.000		
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)						2.14.03.2.02.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	1	Laporan	865.773.400	865.773.400	Sub Kegiatan Baru sesuai dengan Aksi Bangsa Kemendagri
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah alat Obat dan Kontrasepsi Pada Pasilitas Kesehatan	40	Lokasi	225.000.000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah alat Obat dan Kontrasepsi Pada Pasilitas Kesehatan	40	Lokasi	1.150.672.750		
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	3	Unit	75.000.000	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	3	Unit	75.000.000		
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya						2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4	Laporan	875.672.750	875.672.750	Sub Kegiatan Baru sesuai dengan Aksi Bangsa Kemendagri
2. 14 .03. 2. 03. 0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	400	Laporan	150.000.000	2. 14. 03. 2. 03. 001	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Laporan	200.000.000		

2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase Kampung KB Bernilai Baik	20	Persen	200.000.000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase Kampung KB Bernilai Baik	20	Persen	387.325.000		
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam	38	Organisasi	100.000.000	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam		Organisasi	75.000.000		
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	100	Dokumen	100.000.000	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Dokumen	103.750.000		
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas						2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah DASHAT di Kampung KB	20	Unit	208.575.000		
2. 14. 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Cakupan Anggota BKB ber-KB	69.78	Persen	1.390.000.000	2. 14. 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Cakupan Anggota BKB ber-KB	69.78	Persen	3.850.000.000		
			Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS ber-KB Mandiri	64.65	Persen					Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS ber-KB Mandiri	64.65	Persen			
			Pusat Pelayanan KS (PPKS)	5.00	Persen					Pusat Pelayanan KS (PPKS)	5.00	Persen			
			Cakupan Remaja Dalam PIK-R/M	77.78	Persen					Cakupan Remaja Dalam PIK-R/M	77.78	Persen			
			Cakupan Anggota BKR ber-KB	80.93	Persen					Cakupan Anggota BKR ber-KB	80.93	Persen			
			Cakupan Anggota BKL ber-KB	59.36	Persen					Cakupan Anggota BKL ber-KB	59.36	Persen			
2. 14. 04 .2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kelompok, Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	35.75	Persen	850.000.000	2. 14. 04 .2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kelompok, Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	35.75	Persen	3.450.000.000		
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2	Laporan	75.000.000	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Laporan	375.000.000		

2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	150	Laporan	75.000.000	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Laporan	175.000.000		
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	30	Unit	200.000.000	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia		Unit	600.000.000		
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	140	Orang	200.000.000	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		Orang	2.000.000.000		
2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	394	Kelompok	300.000.000	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan		Kelompok	300.000.000		
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan,dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Keluarga, Sarana Penunjang Bagi Tim TPPS serta Peningkatan Kapasitas Mitra dan Ormas	70	Persen	540.000.000	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan,dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Keluarga, Sarana Penunjang Bagi Tim TPPS serta Peningkatan Kapasitas Mitra dan Ormas	70	Persen	400.000.000		
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4	Laporan	150.000.000	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Laporan	300.000.000		

2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	68	Organisasi	215.000.000								
2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	68	Laporan	175.000.000	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja			100.000.000	
JUMLAH						15.200.954.484	JUMLAH						27.993.309.356	12.792.354.872

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan salah satu rencana pencapaian kinerja tahun Ke-5 (Lima) urusan wajib bukan pelayanan dasar dengan Indikator Kinerja Utama adalah:

Indikator Kineja Utama (IKU)
Nilai Akuntabilitas Kinerja DPPKB
Angka Total Fertility Rate (TFR) per WUS (15-49 tahun)
Indek Pembangunan Keluarga

RencanaKerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Tahun 2025. Proses penyusunan RKPD Tahun 2024 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah.

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian:
1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu melakukan perhitungan Indeks Pembangunan Keluarga.

2. Angka Total Fertility Rate (TFR) dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu:

- Angka Pemakaian CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun.

- Angka peserta KB Baru.

- Angka unmetneed

- Penggunaan MKJP

- Persentase angka drop-out akseptor

3. Kurang nya sarana dan prasarana pelayanan dalam menunjang kegiatan baik untuk pelayanan internal maupun pelayanan eksternal terkait dengan tugas dan fungsi OPD serta sarana prasarana kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

4. Jumlah tenaga PKB/PLKB yang jauh dari ideal, sekitar 5 Desa dibina oleh satu orang PKB/PLKB sedangkan yang idealnya 1 atau 2 Desa di bina oleh 1 orang PKB/PLKB.
5. Percepatan Penurunan STUNTING di wilayah LOKUS STUNTING masih tinggi.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi RENJA merupakan hal penting yang perlu di upayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistic yang di emban oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

c. Rencana tindak lanjut

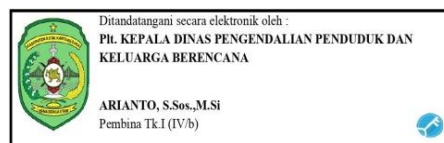
Sasaran yang ingin di capai dalam kurun waktu satu tahun kedepan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja perlu di tetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang di tuangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja di atas tidak dapat di laksanakan melalui suatu kegiatan yang bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sarana prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun berdasarkan program dan kegiatan pada bidang-bidang teknis dan usulan dari hasil musrenbang kabupaten. Penyempurnaan metrik RENJA OPD bertujuan untuk mewujudkan alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indicator kerjanya. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan rencana kerja tahunan adalah target dan pencapaian indicator kinerja.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disampaikan, sebagai acuan dan di jadikan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan serta sebagai alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, efesiensi belanja dan akuntabilitas kinerja Pemerintah.

Tenggarong, April 2024



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)